KAMPUS

Enam Ratus Peserta Ikuti Kuliah Umum Prodi PPKn UAD

JOGJA, *Radar Jogja* - Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta mengadakan kuliah umum. Dengan tema "Menjaga Semangat Belajar Mandiri di Masa Pandemi Covid 19".

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Kaprodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Dr. Susan Fitriasari, M.Pd., dengan moderator dosen UAD Syifa Siti Aulia, M.Pd. Tercatat 600 peserta bergabung melalui *zoom meeting* dan kanal *YouTube* PPKn UAD. Yakni mahasiswa, dosen, alumni, guru, dan pemerhati pendidikan lainnya.

Kaprodi PPKn UAD Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd. menuturkan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dibarengi dengan semangat belajar mandiri dari para peserta didik dan tenaga kependidikan."Belajar mandiri bukan sekadar meminta peserta didik untuk belajar sendiri, tetapi bagaimana menciptakan prakarsa mereka untuk belajar," ujarnya, kemarin (28/12).

Sementara itu, Wakil Dekan FKIP UAD Dr. Dody Hartanto, M.Pd., mengapresiasi kegiatan dan pemilihan tema yang menurutnya sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai."Mengingat kegiatan akademik semester genap di UAD yang juga masih dilaksanakan secara daring," ungkapnya.

Susan menyampaikan, saat *physical distancing* proses pembelajaran hanya bisa digunakan secara virtual. Oleh sebab itu, kemandirian belajar bagi peserta didik sangat diperlukan untuk tetap menjaga kualitas belajar. "Sebagai pendidik, harus terus mendorong peserta didiknya agar tetap bersemangat melaksanakan tahap demi tahap proses pembelajaran," tuturnya.

Kuliah umum diakhiri dengan pembagian door prize untuk para peserta kuliah umum. Yakni berupa buku-buku hasil karya dosen Prodi PPKn FKIP UAD, dan Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. **(*/pra/by)**

UAD FOR RADAR JOGJA

JAGA KUALITAS: Prodi PPKn FKIP UAD mengadakan kuliah umum Menjaga Semangat Belajar Mandiri di Masa Pandemi Covid 19.

Perekonomian DIJ Akan Bangkit Tahun Depan

JOGJA, *Radar Jogja* - Berbagai kalangan meyakini perekonomian DIJ tahun depan akan membaik. Itulah yang disampaikan para pembicara dalam jumpa pers online Universitas Widya Mataram (UWM) Jogjakarta.

RIANSYAH FOR RADAR JOGJA

Edy Suandi Hamid

"Perekonomian DIJ yang sudah mengalami resesi pada 2020, akan mulai bangkit dan mengalami percepatan pertumbuhan pada semester kedua 2021," kata Rektor UWM Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. pada acara jumpa pers online, bertempat di rektorat UWM Jogjakarta Rabu (23/12). Acara juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa, dosen dan tenaga pengajar UWM serta sejumlah peserta umum dari luar.

Acara ini mengambil tema "Outlook Indonesia 2021: Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, Bidang Pangan, dan Bidang Politik." Dalam acara ini, Edy Suandi menerangkan dari Outlook Ekonomi Indonesia dan Ekonomi Pendidikan bahwa Mesin penggerak pertumbuhan ekonomi DIJ ada dua pilar. Yaitu sektor pariwisata dan sektor pendidikan.

Menurut dia, kedua sektor ini bergerak cepat karena keterisolasian dan mobilitas yang sangat terbatas selama pandemi Covid-19. "Menjadi bagaikan sumbatan lava dipuncak gunung yang kemudian meledak, yang kemudian menjadi akumlasi hasrat berpergian, yang memilih DIJ sebagai salah satu tujuan wisata," ujar Edy.

Demikian pula pelajar dan mahasiswa, lanjut dia, yang sudah meninggalkan DIJ sejak Maret 2020. Memendam kerinduan untuk segera kembali ke DIJ manakala ada kesempatan yang aman. "Kesempatan itu diperkirakan terjadi awal semester 2, yang memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi di DIJ," imbuhnya.

Dari Outlook bidang pangan, Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P. menambakan tentang tren pangan 2021. Inovasi-inovasi pangan yang dilakukan di tahun 2020 akan sangat mewarnai tren pangan 2021. Produk pangan berbasis pangan fungsional dapat dipastikan akan mendominasi pasar.

Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 yang membuat industri pangan mengalami transformasi radikal karena Teknologi Internet of Things. "Demikian pula pergeseran selera produk pangan yang terjadi pada kelompok milenial. Meskipun demikian, ada prinsip yang tidak boleh berubah, yaitu nilai pangan," jelasnya.

Sementara dari *outlook* bidang hukum Kelik Endro Suryono SH M.Hum memprediksi persoalan-persoalan hukum dan penegakkan hukum yang akan muncul pada 2021 di antaranya, kelanjutan kasus Harun Masiku, kasus Habib Riziq, kasus tentang IT dan masih kasus korupsi. Prediksi tahun depan dalam hal penegakkan hukum Pemerintah bersama-sama apparat hukum pasti akan bekerja dengan baik, namun demikian tetap saja ada kekhawatiran masyarakat terhadap penegakkan hukum terhadap kasus-kasus yang bermuatan politis. "Untuk kasus korupsi penegakkan hukum akan tetap berjalan dengan baik karena beberapa kali KPK sudah menjalankan tugasnya dengan baik," jelasnya.

Dari Outlook 2021 Bidang Sosial dan Politik, Dr. As Martadani, MA menjelaskan gambaran arah bagaimana konsolidasi demokrasi nasional 2021 yang membaca peristiswa dan rangkaian sosial dan politik 2020. **(sce/mg3/pra/by)**

MasArjO

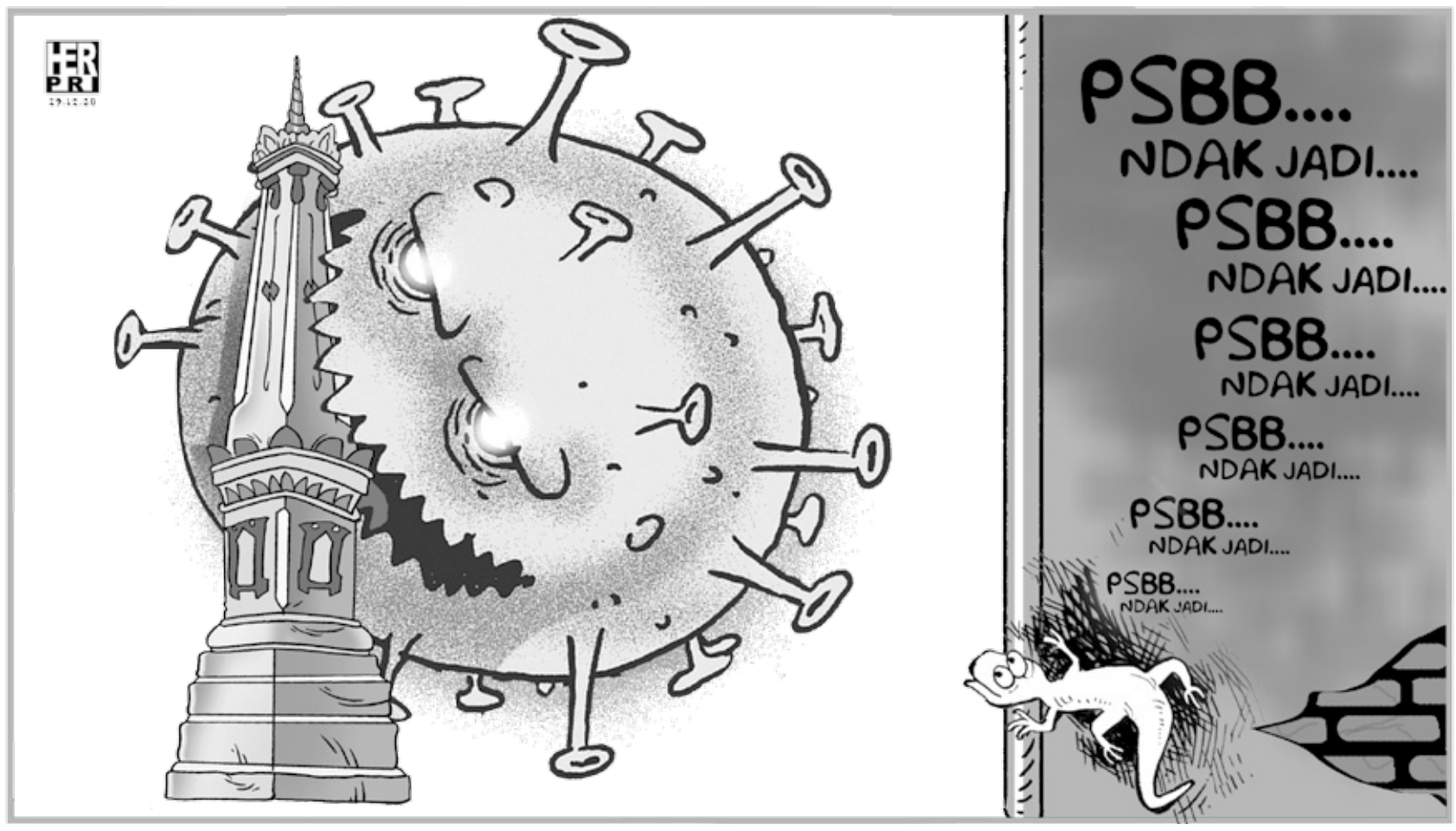

Jelang Muswil, Arah Politik PAN Berubah

Terkait Keistimewaan, Ingin Berkontribusi Positif

JOGJA, *Radar Jogja* - Partai Amanat Nasional (PAN) DIJ menjadi salah satu kekuatan politik yang dikenal kritis menyoroti pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Di tingkat parlemen, Fraksi PAN DPRD DIJ beberapa kali mengambil sikap berbeda dengan mayoritas fraksi di dewan.

Bahkan fraksi matahari biru itu kerap berseberangan dengan pandangan Pemprov DIJ saat pembahasan sejumlah peraturan daerah istimewa (perdais). Antara lain perdais pertanahan dan perdais tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Fraksi PAN mengajukan *minderhaid nota* atau nota keberatan menjelang disahkannya Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kemudian saat paripurna Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten seluruh anggota Fraksi PAN DPRD DIJ menyatakan *walk out* keluar dari ruang sidang.

PAN juga menyoal digunakannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ No. 25 Tahun 2019 sebagai dasar pedoman penyusunan perubahan perda kelembagaan kabupaten dan kota se-DIJ.

Sebutan pemerintah desa dan kepala desa diubah menjadi pemerintah kalurahan serta lurah desa. Camat diganti istilah dengan nama panewu. Kecamatan menjadi kapanewon. Padahal sesuai Permendagri No. 8 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) seharusnya pedoman bagi kabupaten dan kota diatur dalam peraturan daerah istimewa (perdais). Bukan dengan pergub. PAN juga menegaskan sesuai UU No. 13 Tahun 2012, urusan keistimewaan DIJ berada di tingkat provinsi. Bukan di kabupaten dan kota. Apalagi tingkat desa.

Namun semua sikap galak itu rupanya bakal menjadi sejarah. Sebab, seiring dengan terjadinya konflik internal pasca Kongres PAN di Kendari 2019 lalu terjadi perubahan arah politik partai tersebut. Khususnya PAN DIJ terhadap keistimewaan DIJ. Sinyal bergesernya arah politik PAN itu terungkap menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) V PAN DIJ yang akan diadakan di Hotel Inna Garuda pada Rabu (30/12) besok.

KUSNO S UTOMO/RADAR JOGJA

CATATAN SEJARAH: Dari kiri Atmaji, Suharwanta, Indaruwanto Eko Cahyono dan Sugeng Nurmanto menjelaskan agenda Muswil V PAN DIJ yang digelar besok. Di antaranya mengundang Gubernur DIJ Hamengku Buwono X saat pembukaan Muswil.

"Kami ingin lebih memberikan kontribusi positif ke Pemprov DIJ yang punya aturan istimewa. Kami buka komunikasi termasuk dengan gubernur dalam rangka musyawarah wilayah (muswil). Ini termasuk langkah baru," ujar Ketua Panitia Muswil PAN DIJ Suharwanta saat menggelar keterangan pers di kantor DPW PAN DIJ Jalan Pramuka Kotagede Jogja, kemarin (28/12).

Suharwanta mengatakan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X termasuk tamu yang diundang dalam acara tersebut. Dia berharap raja Keraton Jogja itu bersedia hadir. "Untuk memberikan sambutan," harapnya didampingi Ketua Pengarah Muswil PAN DIJ Indaruwanto Eko Cahyono, Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Atmaji dan Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) DIJ Sugeng Nurmanto. Pelaksana Tugas Ketua DPW PAN DIJ Ahmad Yohan juga ada di lokasi. Namun tidak ikut memberikan penjelasan ke wartawan.

Suharwanta menambahkan, partainya tidak tergantung figur atau tokoh. PAN punya pengalaman panjang dalam kerja-kerja politik. Ini mengingat usia PAN lebih dari 20 tahun. Diakui, dengan hengkangnya beberapa figur punya dampak bagi partainya. Namun pengaruhnya dirasakan tidak begitu signifikan.

"Satu dua pasti ada pengaruhnya. Seperti ungkapan patah satu tumbuh seribu. Kami optimistis melangkah ke depan," tegasnya. Terkait kehadiran partai baru, wakil ketua DPRD DIJ itu merasa tidak ada masalah. Baginya ada atau tidak partai baru, PAN harus tetap menggalang konsolidasi. Kinerja baik partai harus dijaga. Sebab, kompetitor bukan hanya partai baru.

Ke depan PAN DIJ akan tampil dengan gagasan baru. Kader-kader muda akan diberikan banyak ruang. Semangat baru untuk perbaikan di masa datang. Partainya juga ingin terbebas dari hegemoni dari pihak manapun. Soal figur Amien Rais yang identik dengan PAN, Suharwanta tidak ingin berandai-andai dan berasumsi. Baginya yang terpenting adalah membangun kinerja partai.

Muswil V DPW PAN DIJ akan dibuka Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara virtual. Pengurus pusat yang dijadwalkan hadir adalah Ketua DPP Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Ahmad Mumtaz Rais. Peserta muswil diikuti 78 orang. Mereka terdiri atas ketua DPC (tingkat kecamatan) dan ketua DPD kabupaten dan kota se-DIJ.

Agenda muswil akan memilih ketua dan pengurus baru. Mekanisme pemilihan ketua DPW PAN DIJ melalui formatur. Ada 12 nama calon formatur yang sudah dikirimkan ke DPP PAN. Dari 12 calon itu diambil empat nama ditambah satu orang dari DPP.

Lima orang itu akan menentukan ketua, sekretaris berikut pengurus DPW PAN DIJ periode 2020-2025. Adapun 12 calon formatur itu adalah Suharwanta, Indaruwanto Eko Cahyono, Respati Agus Sasangka dan Sugeng Nurmanto. Kemudian Heroe Poerwadi, Arif Kurniawan, Hanum Salsabiela serta Mahmud Ardi Widanto. Berikutnya Arif Noor Hartanto, Atmaji, Priyo Santoso dan R. Inoki Azmi Purnomo.

Ketua BM PAN DIJ Sugeng Nurmanto menegaskan kesiapannya mengamankan jalannya muswil. "Agenda lima tahunan ini harus berjalan sukses. Sukses muswil dan sukses partai," tegasnya. **(kus/by)**

Digembosi dan Ditempeli Stiker, Belum Ditilang

ww**JOGJA**, *Radar Jogja* - Dishub Kota Jogja berjanji akan menertibkan kendaraan yang parkir liar selama musim liburan ini. Terutama terhadap perilaku warga yang memarkir kendaraan di rambu atau marka larangan parkir.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Imanudin Azis mengatakan, penertiban parkir akan dilakukan di titik tertentu yang berpotensi dimanfaatkan juru parkir (jukir) liar sebagai lahan parkir. Titik yang menjadi sasaran seperti Jalan Pasar Kembang dan Suryatmajan. "Terutama penertiban parkir seperti biasa di jalan Pasar Kembang kemudian di jalan Suryatmajan," katanya kemarin (28/12).

Imanudin menjelaskan patroli itu sudah lebih dulu dilaksanakan dalam rangkan penertiban menjelang natal dan tahun baru (nataru) lalu. Selama libur natal tempo lalu, ada sekitar 26 pelanggar kendaraan roda empat atau mobil. Di antaranya 20 kendaraan terjaring di Jalan Pasar Kembang dan enam kendaraan lain di Jalan Suryatmajan. "Dari sore sudah parkir di sana, rata-rata posisi parkirnya di marka biku nol derajat. Kita langsung penindakan penempelan stiker dan penggembosan salah satu ban mobil," ujarnya.

> **Selama ini tidak dilakukan penilangan. Tapi mungkin jelang tahun baru dilakukan tilang akan kami koordinasikan dengan Satlantas Porlesta."**
>
> **IMANUDIN AZIS**
> *Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja*

Stiker yang ditempelkan pada kendaraan yang melanggar bertuliskan bahwa yang bersangkutan telah melanggar Perda Kota Jogja No 2/2019 tentang Perparkiran pasal 51 (a) yaitu tidak mematuhi tanda-tanda parkir atau rambu, marka, dan tanda lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. "Selama ini tidak dilakukan penilangan. Tapi mungkin jelang tahun baru dilakukan tilang akan kami koordinasikan dengan Satlantas Porlesta," jelasnya.

Rata-rata sejumlah pelanggar tersebut, ditemui ketika kendaraannya sudah terparkir. Hampir semuanya kendaraan dengan kondisi parkir tanpa pengemudi. Dimungkinkan, ada jukir yang mengarahkan pengemudi untuk memarkir di lahan yang dimanfaatkan para jukir sebagai lahan pakir namun lahan tersebut terdapat rambu dan marka larangan parkir. "Karena kita cek ulang malam ke sana orangnya (jukir) nggak ada. Tapi ada *stick line*-nya, kita ambil (stick line)," terangnya.

Meskipun, kondisi Jalan Pasar Kembang sudah berubah dengan sistem satu arah (SSA). Namun, tetap terdapat rambu dan marka biku larangan parkir khususnya jalan sisi utara. Maka tidak serta merta bisa parkir sembarangan. "Kalau sisi utara sangat jelas karena disitu ada rambu dan ada marka biku serta imbauan. Sehingga disamping untuk kelancaran lalu lintas kita juga memastikan agar penumpang naik turun kereta kita minta masuk ke dalam," jabarnya. Pun secara kapasitas tempat khusus parkir (TKP) masih memenuhi. Baik TKP Abu Bakar Ali (Aba), Senopati, maupun Ngabean. "Secara kapasitas masih bisa. Karena TKP secara posisi itu kemanfaatannya bisa untuk parkir mobil dan bus," imbuhnya. **(wia/pra/by)**